



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Renja Perubahan merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Renja Perubahan ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Semoga Allah, SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Aamiin.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024

KEPALA DINAS PMDPPA,



H. ABBASARAS SP., M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19651231 198711 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN	5
2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	5
2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	14
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2024	14
BAB IV : PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	6
Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2024	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

- a. Rancangan akhir Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksudnya disusun Renja Perubahan adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah :

- 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkisanmbungan;
- 2) Penyesuaian target kinerja dan pagu program, kegiatan dan sub kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan,

- 3) Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
- 4) Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN	Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN	Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan perubahan tahun 2024
BAB IV	PENUTUP	

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Dalam Dokumen Perencanaan dilakukan Evaluasi dalam pelaksanaannya, maka dari itu Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut harus dilakukan evaluasi.

Adapun yang perlu diperhatikan dalam Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja dan melampaui target kinerja yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan yang direncanakan.
3. Dampak yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil dalam mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
2. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan Perubahan Renja tahun 2024.
4. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan.
5. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan serta seksi pelaksana.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemdes dan PPA sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabnel II.1.a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kagiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkenaan dengan Pelayanan Dasar								
	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif	99.00 %						
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan organisasi pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender	96.01 %						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Perbup/Perda yang dirumuskan terkait pelaksanaan PUG	1 Perbup/Perda						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang						
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Orang yang diberikan sosialisasi terkait kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	180 Orang						

	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55.01	55.01				55.01	100.00
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi yang mendapatkan informasi terkait partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10 Organisasi	10				10	100.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	100.00%						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang didampingi	3 Lembaga						
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas yang diberikan informasi layanan pemberdayaan perempuan	60 Orang						
	PPROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0.21 %						
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kekerasan terhadap perempuan	100.00%						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang diberikan informasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	60 Orang						
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan rujukan lanjutan yang tersedia bagi perempuan korban kekerasan	100.00%						
	Penyediaan Layanan Pengaduan	Jumlah pengaduan kasus	15 Kasus						

	Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	kekeraan perempuan yang ditangani							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas layanan rujukan yang terinformasi terhadap penanganan kasus kekerasan perempuan	50 Orang						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga dan sumber daya manusia yang mendapatkan engembangan perlindungan perempuan	100.00%						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pendampingan dan memanfaatkan sarana prasarana	20 Orang						
	Penyedia Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spesifik	15 Orang						
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan keluarga dan lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pengembangan kualitas keluarga	0.30%						
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	100.00%						
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mendapatkan informasi teknik pembuatan media edukasi KG dan perlindungan anak	350 Orang						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah	Persentase pengembangan layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam	100.00%						

	Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	daerah kabupaten/kota							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan dalam rangka pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	4 Kali						
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang diberikan informasi peningkatan kualitas keluarga	170 Orang						
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak	100.00%						
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis data gender dan anak dalam kelembagaan data	100.00%						
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak yang dibuat	8 Dokumen						
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga atau OPD yang memanfaatkan data gender	48 Lembaga & OPD						
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kekerasan terhadap anak	0.001%						
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memberikan layanan untuk pemenuhan hak anak	100.00%						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha dalam rangka pemenuhan hak anak	4 Kali						
	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah koordinasi dalam	18 Kali						

	Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	rangka pemberian informasi pemenuhan hak anak							
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Latihan untuk peningkatan kualitas hidup anak	100.00%						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mendapatkan informasi terkait pemenuhan kualitas hidup anak	60 Orang						
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis media KIE yang dibuat	3 Jenis Media KIE						
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring antar lembaga penyedia layanan kualitas Hidup anak	1.050 Orang						
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100.00%						
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota	100.00%						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	7 Kali						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mendapatkan informasi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	50 Orang						
	Pemyediaan Layanan Bagi Anak	Cakupan layanan bagi	100.00%						

	yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	anak yang memerlukan perlindungan khusus							
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100.00%						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Penyedia Layanan Bagi Anak	100.00%						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	3 Kali						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mendapatkan informasi terkait perlindungan khusus anak	45 Orang						
	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase peningkatan perkembangan desa	100.00%						
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan fasilitasi pembinaan dan pembentukan penataan desa	100.00%						
	Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah desa terbentuk	3 Desa						
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah perdes kewenangan desa	20 Perdes						
	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah desa baru dan kode desa terbentuk	3 Desa						
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan	1 Desa Adat						

		kabupaten							
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah desa mandiri yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	10 Desa						
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang telah menjalin perjanjian kerjasama	100.00%						
	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Cakupan kerjasama desa	100.00%						
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Persentase desa yang telah menjalin perjanjian kerjasama	100.00%						
	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama dalam kabupaten	30 Desa						
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan yang difasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	3 Kawasan						
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	75.00%						
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa	100.00%						
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menerapkan standar pelayanan minimal desa	20 Desa						
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah kepala desa, aparat desa dan anggota BPD mengetahui produk hukum desa	816 Orang						
		Jumlah produk hukum desa	15 Produk Hukum						
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrembang RKPDesa/APBDesa	204 Desa						
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah kepala desa, aparat desa dan aparat kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1.224 Orang						
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musyawarah desa	68 Desa						

	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa Membuat Perdes sesuai Peraturan Perundang-undangan	204 Desa						
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang dibina	51 BUMDes						
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah penyelenggaraan pemilihan kepala desa	30 Desa						
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah kepala desa yang dilantik	30 Desa						
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah profil desa yang dibuat	204 Profil Desa						
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparat desa yang difasilitasi terkait manajemen pemerintahan desa	1.836 Orang						
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah laporan aset desa yang direkonsiliasi	204 Laporan Desa						
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	1.020 Orang						
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah perbup batas desa yang diterbitkan	1 Perbup						
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah laporan pertanggungjawaban kepala desa	204 Laporan						
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang mendapat urusan penugasan kewenangan kabupaten	30 Desa						
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa Tingkat Provinsi	30 Desa						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa/Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	100.00%						
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak	Persentase Lembaga Kemasyarakatan	100.00%						

	di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan yang dibina							
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Aparat Desa/Kelurahan yang Mengikuti Sosialisasi	318 Desa/Kelurahan						
		Jumlah Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang di Inventarisasi	86 Lembaga Adat Desa/Kelurahan						
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPM Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan	87 Lembaga						
		Jumlah Lembaga Posyandu Desa/ Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan	106 Desa/Kelurahan						
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengurus BP-SPAMS Pengelolaan Air Bersih yang akan dibina	79 BP- SPAMS						
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilatih Masyarakatnya	60 Desa/Kelurahan						

		Jumlah Kelompok UPK eks PNPM yang difasilitasi	30 Kecamatan						
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok TTG yang akan dibina	58 Kelompok						
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok PKK Desa/Kelurahan yang dibina							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100.00%						
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	100.00%						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	7 Dokumen						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	3 Dokumen						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	3 Dokumen						
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	3 Dokumen						
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	3 Dokumen						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	6 Dokumen						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	36 Bulan						
	Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3 Laporan						
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100.00%						

	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan	4 Unit						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100.00%						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Buah						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	430 Kali						
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	210 Kali						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Baran Milik Daerah	100.00%						
	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis meubeleur yang diadakan	3 Unit						
	Penagdaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	6 Unit						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100.00%						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	1.000 Lembar						
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 Bulan						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36 Bulan						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100.00%						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan pemeliharaan secara rutin/berkala	48 Unit						
	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	1 Unit						

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	30 Unit						
		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	26 Unit						

Tabel II.1.b
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 7	10 = (9/4*100)
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		100 Persen		100 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen
2	13.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen
2	13.01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	42 Bulan		14 Bulan	6 Bulan	50.00 Persen	6 Bulan	14,28 Persen
2	13.01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100,00 Persen	2 Dokumen	33,33 Persen

2	13.01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 Persen	1 Dokumen	33,33 Persen
2	13.01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00 Persen	0 Dokumen	00,00 Persen
2	13.01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 Persen	1 Dokumen	33,33 Persen
2	13.01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00 Persen	0 Dokumen	0,00 Persen
2	13.01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100,00 Persen	2 Laporan	33,33 Persen
2	13.01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen
5	13.01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.610 Orang/ Bulan		490 Orang/ Bulan	210 Orang/ Bulan	42.85 Persen	210 Orang/ Bulan	13.04 Persen
2	13.01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan?Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	180 Laporan		60 Laporan	30 Laporan	50.00 Persen	30 Laporan	16.66 Persen
2	13.01	2.06		Admnistrasi Umum Peangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen
2	13.01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	5 Paket		1 Paket	0 Paket	0.00 Persen	0 Paket	0.00

					disediakan							
2	13.01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	445 Laporan		145 Laporan	26 Laporan	17.93 Person	26 Laporan	5.84 Persen
2	13.01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen		100 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen
2	13.01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan		12 Laporan	6 Laporn	50.00 Persen	6 Laporan	16.66 Persen
2	13.01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 Laporan		12 Lporan	6 Laporn	50.00 Persen	6 Laporan	16.66 Persen
2	13.01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen		100 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen
2	13.01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	48 Unit		16 Unit	2 Unit	12.50 Persen	2 Unit	4.16 Persen
2	13.01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit		3 Unit	0 Unit	0.00 Persen	0 Unit	0.00 Persen
2	13.03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan kawasan kawasan perdesaan yang difasilitasi	100 Persen		100 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen
2	13.03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Cakupan kawasan perdesaan	100 Persen		100 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen
2	13.03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	10 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50.00 Persen	1 Dokumen	10.00 Persen
2	13.04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tertib administrasi desa dan pelaporan tepat waktu	100 Persen		100 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen
2	13.04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan tatakelola administrasi pemerintahan desa	100 Persen		100 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen

2	13.04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	204 Dokumen		68 Dokumen	34 Dokumen	50.00 Persen	34 Dokumen	16.66 Persen
2	13.04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa	204 Dokumen		68 Dokumen	34 Dokumen	50.00 Persen	34 Dokumen	16.66 Persen
2	13.04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa	68 Dokumen		23 Dokumen	10 Dokumen	43.40 Persen	10 Dokumen	14.70 Persen
2	13.04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan asset desa	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	100.00 Persen	68 Dokumen	100.00 Persen
2	13.04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	15 Desa		5 Desa	0 Desa	0.00 Persen	0 Desa	0.00 Persen
2	13.05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	100 Persen		100 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen
2	13.05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang dibina	100 Persen		100 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen
2	13.05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	50 Dokumen		17 Dokumen	0 Dokumen	0.00 Persen	0 Dokumen	0.00 Persen

					Masyarakat Hukum Adat							
2	13.05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	32 Lembaga		12 Lembaga	12 Lembaga	100.00 Persen	12 Lembaga	37.50 persen
2	13.05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	49 Unit		20 Unit	10 Unit	50.00 Persen	10 Unit	20.40 Persen
2	13.05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	60 Laporan		20 Laporan	0 Laporan	0.00 Persen	0 Laporan	0.00 Persen
2	13.05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	39 Dokumen		13 Dokumen	0 Dokumen	0.00 Persen	0 Dokumen	0.00 Persen
2	13.05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	318 Dokumen		106 Dokumen	16 Dokumen	15.00 Persen	16 Dokumen	5.03 Persen
2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								

2	08.02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja operasional dan belanja modal APBD	100 Persen		100 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen
2	08.02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan organisasi pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender	87.00 Persen		29 Persen				
2	08.02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0.00 Persen	0 Dokumen	0.00 Persen
2	08.04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga dan lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pengembangan kualitas keluarga	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	08.04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	08.04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	87 Perangkat Daerah		29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	100.00 Persen	29 Perangkat Daerah	33.33 Persen
2	08.06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	100 Persen		100 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen
2	08.06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memberikan layanan untuk pemenuhan hak anak	100 Persen		100 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen

2	08.06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	12 Organisasi		3 Organisasi	2 Organisasi	6.66 Persen	2 Organisasi	16.66 Persen
---	-------	------	------	--	--	------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang didukung dengan potensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Sarana dan Prasarana belum memadai
3. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pengurus LKD
4. Kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang peran dan fungsi lembaga usaha ekonomi desa (BUMDes, TTG dan Kawasan Perdesaan)
5. Dampak perubahan regulasi pada Lembaga Ekonomi Desa
6. Pengawasan pelestarian aset dari program nasional sangat lemah.
7. Kurangnya pemahaman aparat desa terhadap pengisian data profil desa yang berbasis website.
8. Kurangnya pemahaman aparat desa terhadap pembentukan produk hukum desa.
9. Belum adanya dokumen terkait penetapan dan penegasan batas desa.
10. Penataan aset desa belum maksimal.
11. Minimnya anggaran sehingga pelaksanaan pelatihan PPRG dan pelatihan pemenuhan hak anak tidak dilaksanakan.
12. Pengembangan PUSPAGA harus bias sampai ke desa.
13. Peningkatan kapasitas SDM dalam pendampingan kasus dan penanganan anak harus tetap dilakukan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2024

Berdasarkan hasil review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah perubahan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas nasional dan kebutuhan dilapangan serta disinkronisasikan dengan program dan kegiatan prioritas. Jumlah program dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebanyak 7 (sembilan) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan). Sumber Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perubahan Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Dana Alokasi Umum Peruntukan. Berikut Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;

5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor;
- 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

II. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

1. Fasilitas Kerja Sama antar Desa

- 1) Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan.

III. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa;
- 3) Fasilitas Penyusunan Profil Desa;
- 4) Fasilitas Pengelolaan Aset Desa.

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- 3) Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang

- Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- 4) Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- 5) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
- 6) Fasilitasi Tim Penggerak dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

V. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- 1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - 1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

VI. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- 1. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.**
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

VII. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

- 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2023							
						SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		Kab. Sidrap		3.305.046.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap		3.530.516.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidrap	100 Persen	2.953.046.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	2.962.656.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	Kab. Sidrap	100 Persen	17.000.000	Aparatur	Kab. Sidrap	100 Persen	17.000.000	Aparatur
2	13.1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Kab. Sidrap	3 Dokumen	3.500.000	Aparatur	Kab. Sidrap	3 Dokumen	3.500.000	Aparatur
2	13.1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur

2	13.1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur
2	13.1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur
2	13.1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur
2	13.1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidrap	2 Laporan	3.500.000	Aparatur	Kab. Sidrap	2 Laporan	2.500.000	Aparatur
2	13.1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Sidrap	100 Persen	2.481.100.000	Aparatur	Kab. Sidrap	100 Persen	2.461.022.000	Aparatur
2	13.1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sidrap	490 Orang/Bulan	2469.100.000	Aparatur	Kab. Sidrap	490 Orang/Bulan	2.449.022.000	Aparatur

2	13.1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Sidrap	60 Laporan	12.000.000	Aparatur	Kab. Sidrap	60 Laporan	12.000.000	Aparatur
2	13.1	2.06		Admnistrasi Umum Peangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Sidrap	100 Persen	197.261.000	Aparatur	Kab. Sidrap	100 Persen	228.552.000	Aparatur
2	13.1	2.06	2	Penyediaan Perelatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Sidrap	1 Paket	85.000.000	Aparatur	Kab. Sidrap	1 Paket	80.000.000	Aparatur
2	13.1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Sidrap	145 Laporan	112.261.000	Aparatur	Kab. Sidrap	145 Laporan	148.552.000	Aparatur
2	13.1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sidrap	100 Persen	203.989.000	Aparatur	Kab. Sidrap	100 Persen	177.480.000	Aparatur
2	13.1	2.08	2	Penyediaan Jasa Konmunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Sidrap	12 Laporan	42.000.000	Aparatur	Kab. Sidrap	12 Laporan	31.000.000	Aparatur
2	13.1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Sidrap	12 Lporan	161.989.000	Aparatur	Kab. Sidrap	12 Lporan	146.480.000	Aparatur
2	13.1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Sidrap	100 Persen	53.696.000	Aparatur	Kab. Sidrap	100 Persen	78.602.000	Aparatur

2	13.1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Sidrap	16 Unit	51.946.000	Aparatur	Kab. Sidrap	16 Unit	77.552.000	Aparatur
2	13.1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Sidrap	3 Unit	1.750.000	Aparatur	Kab. Sidrap	3 Unit	1.050.000	Aparatur
2	13.3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang telah menjalin perknjian kerjasama	Kab. Sidrap	100 Persen	15.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	15.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.3	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Cakupan kerja sama desa	Kab. Sidrap	100 Persen	15.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	15.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.3	2.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Kab. Sidrap	2 Dokumen	15.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	2 Dokumen	15.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	Kab. Sidrap	100 Persen	80.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	75.860.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan tatakelola administrasi pemerintahan desa	Kab. Sidrap	100 Persen	80.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	75.860.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	Kab. Sidrap	68 Dokumen	20.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	68 Dokumen	29.756.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa	Kab. Sidrap	68 Dokumen	30.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	68 Dokumen	30.000.000	Aparatur dan Masyarakat

2	13.4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa	Kab. Sidrap	23 Dokumen	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	23 Dokumen	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan asset desa	Kab. Sidrap	68 Dokumen	10.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	68 Dokumen	11.104.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	Kab. Sidrap	5 Desa	15.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	5 Desa	0	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa/ kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang aktif	Kab. Sidrap	100 Persen	257.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	477.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang dibina	Kab. Sidrap	100 Persen	257.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	477.000.000	Aparatur dan Masyarakat

2	13.5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyan du LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sidrap	17 Dokumen	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	17 Dokumen	0	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyan du,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidrap	12 Lembaga	52.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	12 Lembaga	52.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5	2.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LP M dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyan du,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sidrap	20 Unit	20.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	20 Unit	20.000.000	Aparatur dan Masyarakat

2	13.5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sidrap	20 Laporan	25.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	20 Laporan	25.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5	2.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Sidrap	13 Dokumen	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	13 Dokumen	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sidrap	106 Dokumen	150.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	106 Dokumen	375.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Kab. Sidrap		610.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap		610.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	8.2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif	Kab. Sidrap	100 Persen	399.999.500	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	399.999.500	Aparatur dan Masyarakat
2	8.2	2.01		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan organisasi pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender	Kab. Sidrap	30.00 Persen	399.999.500	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	30.00 Persen	399.999.500	Aparatur dan Masyarakat

2	8.2	2.01	4	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	2 Dokumen	399.999.500	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	2 Dokumen	399.999.500	Aparatur dan Masyarakat
2	8.4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga dan lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pengembangan kualitas keluarga	Kab. Sidrap	100 Persen	149.500.000	Masyarakat dan Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	100 Persen	149.500.000	Masyarakat dan Perangkat Daerah
2	8.4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga dan lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pengembangan kualitas keluarga	Kab. Sidrap	100 Persen	149.500.000	Masyarakat dan Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	100 Persen	149.500.000	Masyarakat dan Perangkat Daerah
2	8.4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sidrap	29 Perangkat Daerah	149.500.000	Masyarakat dan Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	29 Perangkat Daerah	149.500.000	Masyarakat dan Perangkat Daerah
2	8.6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Kab. Sidrap	100 Persen	60.500.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	60.500.000	Aparatur dan Masyarakat

2	8.6	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak	Kab. Sidrap	100 Persen	60.500.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	100 Persen	60.500.000	Aparatur dan Masyarakat
2	8.6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Sidrap	2 Organisasi	60.500.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	2 Organisasi	60.500.000	Aparatur dan Masyarakat

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan visi dan misi daerah serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang dan seluruh staff Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
 - a. Melaksanakan Perubahan Renja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

1.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P). Implementasi dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024

KEPALA DINAS PEMDES DAN PPA,



H.ABBASARAS,SP.,M.AP

Nip. 19651231 198711 1 013